

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya kecil. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa yang akan datang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Menurut Kementerian UMKM dan Koperasi, perkembangan UMKM di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan usaha-usaha tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan lembaga keuangan lainnya dalam hal membantu permodalan bagi usaha kecil dan menengah. Salah satu lembaga keuangan yang membantu dalam permodalan adalah bank. UMKM itu sendiri dibagi antara usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibedakan dari omset, jika usaha mikro dan kecil digolongkan pada omset kurang dari 1 miliar sedangkan untuk usaha menengah digolongkan pada omset diatas 1 miliar (Kementerian UMKM dan Koperasi, 2010).

Saat ini peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya adalah

keterbatasan modal yang dimiliki. Permodalan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM dengan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan. Keterbatasan modal tersebut akan mempengaruhi kinerja UMKM yaitu menurunnya kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa secara efektif, berkurangnya jumlah tenaga kerja yang mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas, pendapatan usaha menjadi rendah karena tidak ada barang yang dijual, dan efisiensi produksi yang tidak berjalan dengan baik sehingga biaya produksi menjadi tinggi. Bagi pengusaha UMKM, kredit dirasa penting untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja usahanya.

Di Indonesia UMKM menjadi bagian penting dari sistem perekonomian, hal ini karena UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh UMKM adalah mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sebagian besar pengusaha UMKM masih dihadapi masalah mengenai keterbatasan penyediaan produk jasa dari lembaga

keuangan yang disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki oleh pengusaha UMKM untuk dijadikan jaminan kredit di bank.

Permasalahan dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan pinjaman. Masalah timbul ketika pengusaha UMKM tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan di Bank. Sehingga pemerintah meluncurkan kredit untuk UMKM dan Koperasi dengan fasilitas penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit yang diberikan kepada UMKM-K dalam bentuk modal kerja yang didukung fasilitas penjaminan. KUR merupakan program dari pemerintah namun sumber dananya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan jaminan kepada resiko KUR sebesar 70 persen dan sisanya sebesar 30 persen ditanggung oleh bank pelaksana (Peraturan Menteri Keuangan, 2008). Menurut Athesa dan Edia (2006), kontribusi micro banking terhadap kinerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) sangat besar. Hal ini yang menyebabkan BRI menjadi bank yang dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan program KUR. BRI sebagai micro banking berupaya membantu mengembangkan UMKM dalam usaha rakyat bagi UMKM. Kredit usaha rakyat ini diharapkan menjadi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan modal pinjaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menggiatkan upaya pengembangan UMKM, pemerintah telah memberikan penilaian kepada beberapa Kota/Kabupaten yang berkomitmen tinggi dalam mengembangkan UMKM melalui pendekatan finansial dan non

finansial di wilayahnya. Penghargaan yang diterima secara non finansial merupakan sebuah perjuangan, konsistensi, iklim yang kondusif dan adanya sinergi antara Pemerintah Kota Jombang dengan pelaku usaha yang ada dikota Jombang. Dengan berkembangnya UMKM di Kecamatan Sumobito maka diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menekan angka pengangguran di Kecamatan Sumobito.

Sedangkan secara Finansial, melihat banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Jombang yaitu 34.056 ribu UMKM dengan jumlah tenaga kerja sebesar 298.196 ribu (sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2019) dan berbagai macam produk yang selalu berinovasi misalnya manik-manik, batik tulis, batik printing, kerajinan dari perak dll. Maka Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya mengembangkan dan menambah jumlah UMKM dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah salah satunya adalah Bank BRI yang mengutamakan pelayanan terhadap UMKM di dalam misinya.

Menurut data yang diperoleh peneliti dari kantor BRI unit sumobito jumlah UMKM-K yang melakukan kredit di BRI unit Sumobito berjumlah 3.428 UMKM-K dengan berbagai macam usaha seperti makanan ringan, krupuk, nampan, toko seba ada dll. Dengan besar pinjaman 25 juta – 50 juta berjumlah 343 UMKM.

Bantuan dalam bentuk kredit modal akan membantu pengusaha UMKM dalam meningkatkan kinerja usaha. Salah satu faktor yang menyebabkan UMKM mengalami kebangkrutan yaitu sulitnya memperoleh modal pinjaman (kredit) dari lembaga keuangan (perbankan). Pemberian

kredit sebagai tambahan modal usaha khususnya dari BRI Unit di Kecamatan Sumobito kepada pengusaha UMKM diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Sumobito. Hal ini karena dengan pemberian KUR kepada masyarakat, secara tidak langsung memberikan dorongan untuk berusaha membuka usaha dan mengembangkannya. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah UMKM di Kecamatan Sumobito akan berdampak terhadap berkurangnya pengangguran dan meningkatkan investasi karena akan banyak dibuka lapangan pekerjaan.

Pemberian kredit bagi UMKM memiliki pengaruh positif terhadap volume usaha. Kredit yang diterima UMKM digunakan untuk membeli kebutuhan bahan baku dan peralatan produksi. Peningkatan volume usaha akan berpengaruh pada meningkatnya produksi barang. Kegiatan produksi tidak akan berjalan jika bahan baku dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi tidak tersedia. Kredit modal kerja yang diberikan dapat membantu pengusaha UMKM dalam mengatasi permasalahan permodalan. Modal tambahan yang diperoleh UMKM dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi (Mulyono 2006).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menindak lanjuti penelitian sebelum dengan mengambil judul “ **PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KINERJA USAHA UMKM DI KECAMATAN SUMOBITO**”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, Rumusan Masalah dalam penelitian ini “Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berpengaruh Terhadap Kinerja Usaha UMKM Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.”

1.3. BATASAN MASALAH

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti membatasi obyek penelitian yakni kinerja UMKM yang diprosikan dengan jumlah produksi dan keuntungan. Obyek Penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara 25 juta sampai dengan 50 juta sebagai permodalan pada BRI Unit kecamatan Sumobito tahun 2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Kontribusi Teoritis

1. Sebagai pengaplikasian secara teori untuk kebijakan yang real dalam bidang usaha UMKM;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam membantu meningkatkan kinerja UMKM.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan kontribusi kepada pelaku usaha UMKM dalam menggunakan kredit yang diperoleh untuk memperbaiki kinerja usaha UMKM yang dimilikinya;
2. Bagi peneliti lain dan pihak – pihak yang memerlukan, dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi yang juga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.